

MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MADRASAH ALIYAH SWASTA AR-RISALAH KRUENG SABEE ACEH JAYA

Sariakin ¹, Cut Faizah ²

Universitas Bina Bangsa Getsempena, Aceh, Indonesia ¹, Universitas Serambi Mekkah, Aceh, Indonesia ²

Email corespondence: sariakin@bbg.ac.id

Article History

Received: 24 July 2023

Approved: 5 August 2023

ABSTRACT

The study is intended to see how education finance is regulated at MAS Ar-Risalah Krueng Sabee Aceh Jaya. This study is a case study. Information is obtained through observation, interviews, and information storage. Furthermore, so that the data can be trusted, several stages are carried out, namely the data source triangulation technique. The data analysis technique uses four stages, namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that: (1) The implementation of education financing management includes the process of planning, using funds, monitoring and accountability. (2) Private Madrasahs cannot only depend on sources of funds from the government in fulfilling education funding. (3) Overall, the implementation of education financing management has been well implemented. The limitations in managing education financing at MAS Ar-Risalah Krueng Sabee Aceh Jaya include: (a) The management structure in financing management is still under the auspices of the foundation's management, school principals and treasurers so that there is no adequate supervision and accountability for financing management; (b) Contributions for educational development are determined collectively and adapted to the needs of students.

Keywords: Management, Financing, Education



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

LATAR BELAKANG

Pendanaan adalah salah satu komponen sumber daya institusi pendidikan yang termasuk pendidikan. Namun, sumber daya tersebut mencakup semua hal yang bersifat material dan immaterial, yang nilainya dapat jauh lebih besar dari uang. Pembiayaan sangat penting untuk keberlangsungan pendidikan. Pendidikan strategis tidak dapat dilaksanakan tanpa dukungan keuangan yang memadai. Dari perspektif ekonomi, setiap kegiatan pendidikan memerlukan biaya untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk kelangsungan pendidikan. (Sariakin, 2023).

Menurut Anwar (2013), pembiayaan yang baik untuk lembaga pendidikan adalah ketika lembaga tersebut dapat memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia dengan cara yang paling efisien dan efektif. Efektifitas dan efisiensi manajemen pembiayaan adalah cara menggunakan biaya pendidikan tanpa mengabaikan kualitas pendidikan. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan biaya satu sekolah dengan sekolah lain dengan atribut yang sama. Keefektifan didasarkan pada hasil yang diinginkan. Pendidikan adalah investasi yang berharga. Pada dasarnya, kesadaran masyarakat untuk membayar pendidikan akan mendorong mereka untuk bertanggung jawab atas pendidikan itu sendiri. Proses pendidikan akan lebih baik jika lembaga pendidikan

menggunakan semua sumber daya yang tersedia. Untuk menghindari pemborosan, lembaga pendidikan, baik pemerintah maupun pihak lain, harus mempertimbangkan efisiensi dan keefektifan saat menggunakan berbagai sumber dayanya. Sistem pengelolaan pembiayaan harus profesional dan jujur. Namun, penyelenggara lembaga pendidikan harus dapat mengelola sumber daya secara kreatif. Lembaga pendidikan harus mempertimbangkan keseimbangan pembiayaan mereka agar mereka tidak hanya bergantung pada bantuan pihak luar, tetapi juga mencoba menghindari ketergantungan. Institusi pendidikan harus memiliki kemampuan untuk memaksimalkan potensi dan sumber daya mereka.

Institusi pendidikan merupakan suatu wadah sosial yang tujuan besarnya untuk melakukan pembelajaran (Sariakin, 2023). Institusi pendidikan bukanlah perusahaan yang bermaksud menghasilkan keuntungan. Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa sekolah tidak berorientasi pada keuntungan, atau berorientasi pada keuntungan. Yang dimaksud dengan berorientasi pada keuntungan adalah bahwa guru memberi prioritas kepada keuntungan dari proses pendidikan di institusi pendidikan. Menurut Bernawi & Arifin (2013), lebih banyak lahan, lebih banyak fasilitas, lebih banyak arus kas, prestasi akademik yang lebih baik, dan

karakter positif siswa adalah semua hasil yang menguntungkan bagi lembaga pendidikan.

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota (UU RI No. 28, 2004). Namun demikian, yayasan seringkali mendapatkan permasalahan yang sering membuat yayasan tersebut terpuruk.

Ketidajelasan dalam struktur manajemen lembaga adalah penyebab umum dari masalah yang muncul. Selama bertahun-tahun, banyak yayasan di Indonesia mengalami penyimpangan dari tujuan filosofis awalnya. Penyimpangan tersebut disebabkan oleh fakta bahwa yayasan sulit untuk mendefinisikan maksud sebenarnya dari kegiatan sosial. Pendidikan terkadang terlibat dalam kegiatan sosial, tetapi sebagian besar institusi pendidikan berfokus pada keuntungan finansial.

Menurut Pasal 48 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengelolaan biaya pendidikan harus didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Sehingga, institusi pendidikan wajib diurus dengan sistem manajemen yang efektif untuk menghilangkan berbagai malfungsi dan praktik pendidikan yang berbahaya.

Pembiayaan tidak dapat dipisahkan dari fungsi pengelolaan pendidikan lainnya. Kiranya bisa dinyatakan bahwa pembiayaan menjadi persoalan utama dalam pengelolaan kegiatan pendidikan. Sebenarnya, semua institusi pendidikan telah melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Salah satu hal yang membedakan lembaga yang satu dengan yang lainnya adalah tingkat substansi pelaksanaannya. Kondisi sosial budaya bergantung pada besar kecilnya lembaga dan lokasinya. Manajemen pembiayaan pendidikan masih mudah dilakukan di lembaga yang daya dukung masyarakatnya masih rendah. Tidak diragukan lagi, lembaga yang mendapatkan dukungan dari masyarakat besar memerlukan manajemen pembiayaan yang lebih rumit untuk dikelola. Ini karena lembaga tersebut harus mampu memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat dari aktivitas masyarakat.

Sebagian besar biaya pendidikan di tingkat sekolah ditanggung oleh sumbangan masyarakat, pemerintah pusat dan daerah, dan iuran siswa. Sekolah swasta dapat mendapatkan dana bantuan operasional dari tingkat sekolah dasar (SD) atau sederajat hingga sekolah menengah atas (SMA) atau setingkatnya. Pemerintah membantu sekolah swasta dengan biaya bantuan operasional. Untuk memenuhi biaya investasi dan operasional, lembaga pendidikan swasta yang mendapatkan dukungan dari pemerintah

pusat dan daerah dapat membayar pembinaan pendidikan. Bantuan ini tidak diberikan kepada semua lembaga pendidikan swasta. Oleh karena itu, bantuan operasional adalah satu-satunya sumber pembiayaan madrasah.

Lembaga pendidikan yang hanya bergantung pada bantuan operasional sekolah sebagai cara pembiayaan madrasah menghadapi masalah baru. Ini adalah masalah karena BOS untuk lembaga swasta diberikan setiap tiga bulan sekali, yaitu dari Januari hingga Maret, April hingga Juni, Juli hingga September, dan Oktober hingga Desember. Ini sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI pada tahun 2015. Jika BOS belum diberikan oleh pemerintah, semua kegiatan operasional lembaga akan terhambat, termasuk pembayaran gaji guru yang belum dibayarkan oleh lembaga. Selanjutnya, jumlah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima oleh sebuah sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah siswa di sekolah tersebut (Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2015).

Menurut petunjuk teknis yang diberikan oleh Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI pada tahun 2015, sekolah dengan banyak murid juga akan banyak, sedangkan sekolah dengan sedikit murid juga akan sedikit, meskipun biaya yang harus dikeluarkan tidak jauh berbeda. Selain itu, masalah lain adalah dana BOS yang

diterima setiap triwulan seringkali tertunda saat pengelola pendidikan kekurangan dana. Hal ini pasti sangat mempengaruhi keberlangsungan pendidikan.

Sekolah swasta mendapatkan uang dari banyak sumber, seperti pemerintah pusat, orang tua, dan orang lain. Ketika dana masyarakat atau pihak ketiga datang ke sekolah, sistem pengelolaan keuangan yang adil dan profesional harus dibuat. (Muhajirin, 2012). Berdasarkan pernyataan Muhajirin tersebut, setiap dana yang ada harus dikelola dengan baik karena setiap dana harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang tentang bagaimana digunakan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Karena mereka bertanggung jawab atas biaya pendidikan, kepala sekolah dan bendahara memiliki peran yang sangat penting dalam manajemen dana pendidikan. Untuk menghindari perbedaan persepsi di antara stakeholder, yaitu komite/yayasan, guru, dan kepala madrasah, kepala madrasah harus melaksanakan manajemen pembiayaan yang terbuka (Muhajirin, 2012).

Perbedaan persepsi ini sering terjadi karena anggapan bahwa kepala madrasah mengelola keuangan dengan buruk, sehingga tidak transparan, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peraturan, struktur manajemen yang tidak jelas yang tidak menjelaskan kewenangan dan tanggung jawab masing-

masing karyawan, dan bahkan lembaga swasta yang tidak menggunakan kontrak kerja.

Selanjutnya, untuk setiap dana yang diberikan oleh orang tua, masyarakat, atau pihak ketiga lainnya, harus ada sistem pengelolaan pembiayaan yang adil dan profesional. Pengelolaan mencakup perencanaan, penyusunan anggaran, penggunaan anggaran, dan pengawasan dan evaluasi serta tanggung jawab atas setiap dana yang diterima sekolah. Sebenarnya, semua sekolah telah melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Namun, tingkat substansi pelaksanaannya berbeda-beda di antara madrasah. Keragaman ini bergantung pada seberapa besar atau kecil tiap madrasah dan di mana mereka terletak. Sekolah umum dengan daya dukung masyarakat yang rendah masih memiliki pengelolaan pembiayaan yang sederhana. Namun, di sekolah umum dengan daya dukung masyarakat yang besar, bahkan mungkin sangat besar, pengelolaan pembiayaan cenderung menjadi lebih rumit karena semua siswa harus dipertanggungjawabkan. Pendekatan ini terjadi karena madrasah harus mampu menunjukkan kualitas pembelajaran yang semakin dibutuhkan oleh masyarakatnya. Hal ini menghasilkan hasil yang menguntungkan bagi penyelenggara pendidikan dan peserta didik.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menganalisis data sekunder menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan rancangan studi kasus. Menurut Moleong (2007), salah satu cara analisis data kualitatif adalah kajian kasus, yang menekankan pada situasi unik yang terjadi pada objek analisis. Dalam pola pikir induktif, pencarian data tidak bertujuan untuk membuktikan hipotesis yang telah dibuat sebelumnya. Sebaliknya, pencarian data dilakukan untuk kepentingan penelitian, dengan peneliti bertindak sebagai alat dan pengumpul data menuju objek penelitian.

Tujuan kajian ini untuk memperoleh gambaran mendalam bagaimana metode manajemen pembiayaan pendidikan di MAS Ar-Risalah Krueng Sabee Aceh Jaya. Data langsung dikumpulkan dari latar belakang alami. Hanya setelah mengetahui lebih banyak tentang fakta, kita dapat memahami data. Diharapkan penelitian ini akan menemukan dan mendokumentasikan informasi tentang proses pengelolaan pembiayaan pendidikan di MAS Ar-Risalah Krueng Sabee Aceh Jaya.

2. Sumber dan Data Penelitian

a. Sumber Data Penelitian

Menurut Moleong (2007), kata-kata dan tindakan adalah sumber data utama dalam penelitian kualitatif. Data tambahan, seperti

dokumen, dan lainnya, menempati sebagian besar. Sugiyono (2017) membagi sumber data menjadi tiga kategori: (1) orang, yang memberikan data dalam bentuk jawaban lisan atau tertulis; (2) tempat, yang memberikan gambaran berupa keadaan tidak bergerak, seperti ruangan, kelengkapan alat, dan sebagainya; dan (3) kertas, yang memberikan gambaran berupa huruf, angka, gambar, atau simbol lainnya.

Sumber data penelitian ini terdiri dari:

a. Individu: Kepala dan Wakil Madrasah, Bendahara, dan Komite; b. Tempat: MAS Ar-Risalah Krueng Sabee Aceh Jaya, serta aktivitas yang dilakukan; dan c. Bahan kertas: dokumen dan data tentang pembiayaan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan informasi tentang pengelolaan pembiayaan pendidikan di MAS Ar-Risalah Krueng Sabee Aceh Jaya, penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengumpulan data. Teknik-teknik yang digunakan meliputi:

1. Observasi

Peneliti menggunakan catatan, alat elektronik seperti kamera, fokus pada data yang tepat, dan bahan persepsi untuk mempermudah pengamatan dalam penelitian ini. Untuk mengetahui bagaimana kepala madrasah memberikan instruksi kepada guru dan staf tentang kebijakan pengelolaan pembiayaan madrasah, observasi dilakukan saat mengikuti rapat guru. Observasi ini

menggali informasi tentang sarana dan prasarana, pemeliharaan sarana pendidikan, dan fasilitas lainnya yang ada di MAS Ar-Risalah Krueng Sabee Aceh Jaya.

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2017), dokumentasi adalah pencarian data tentang objek atau faktor seperti transkrip, catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan lainnya. Data dari dokumentasi dapat mempercepat proses penelitian karena dapat memperjelas identitas subjek penelitian. Selain itu, data dari dokumentasi memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi akan kebenaran atau keabsahan data.

Dokumen tertulis, termasuk surat keputusan, arsip madrasah, dan rencana anggaran pendapatan dan belanja, digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi tentang perencanaan anggaran, penggunaan dana, pengawasan, dan pertanggungjawaban pembiayaan madrasah.

3. Wawancara

Moleong (2007) menyatakan bahwa wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi antara setidaknya dua orang atas dasar ketersediaan dan dalam lingkungan alami. Arah pembicaraan mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, dan proses pemahaman berpusat pada kepercayaan. Pada tahap awal penelitian, peneliti menggunakan metode wawancara yang tak terstruktur; ini berarti wawancara dilakukan secara bebas

dan santai, sehingga subjek memiliki banyak kesempatan untuk memberikan informasi yang tidak terduga dan tidak diketahui jika wawancara terstruktur dilakukan. Peneliti memberi subjek kebebasan dan kesempatan untuk mengungkapkan pikiran, pendapat, dan perasaannya tanpa terbatas.

Setelah mendapatkan pemahaman dasar tentang pengelolaan pembiayaan pendidikan di Ar-Risalah Krueng Sabee Aceh Jaya, peneliti kemudian menggunakan metode wawancara terstruktur untuk mempelajari lebih lanjut tentang masalah yang dibahas secara khusus. Dalam proses wawancara ini, peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan yang rinci dan menyeluruh kepada semua orang yang terlibat dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan.

4. Keabsahan Data

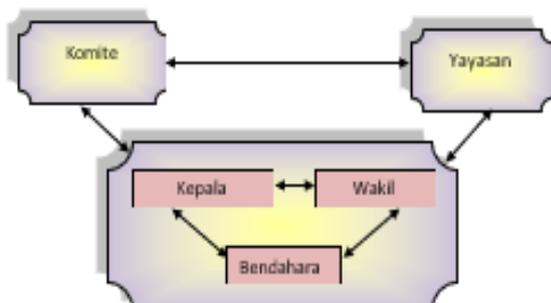
Dalam kajian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Moleong (2007) menyatakan bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain untuk pembandingan terhadap data. Sugiyono (2017) membedakan tiga macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber yaitu metode, penyidik, dan teori.

Peneliti menggunakan dua metode triangulasi: triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode. Menurut Moleong (2007), triangulasi dengan sumber adalah

pemeriksaan melalui sumber lain yang dilakukan dengan cara-cara berikut: pertama, membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; kedua, membandingkan apa yang dikatakan orang secara pribadi tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu; ketiga, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan perspektif; dan keempat, membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Menurut Miles dan Huberman dalam Iskandar dkk (2010), triangulasi dilakukan untuk mengevaluasi metode pengumpulan data. Ini mengevaluasi apakah informasi yang diperoleh dari wawancara sama dengan informasi yang diperoleh dari observasi atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan selama wawancara.

Teknik triangulasi dengan sumber yang dilakukan peneliti yaitu: (1) peneliti membandingkan yang dikatakan oleh komite/orang tua siswa dengan kepala madrasah, wakil kepala madrasah dan bendahara; (2) peneliti membandingkan pembiayaan pendidikan sekolah di Ar-Risalah Krueng Sabee Aceh Jaya yang dikatakan oleh kepala madrasah, wakil kepala madrasah, dan bendahara dengan Yayasan; (3) peneliti membandingkan hasil wawancara yayasan dengan komite. (4) peneliti membandingkan hasil wawancara antara

kepala madrasah, Wakil kepala madrasah dan bendahara. Secara lebih jelas digambarkan dalam gambar berikut:



Gambar 1. Triangulasi dengan sumber didaptasi dari Moleong (2007)

Teknik triangulasi dengan metode yang dilakukan peneliti yaitu: (1) peneliti membandingkan data hasil wawancara dengan observasi; (2) peneliti membandingkan data hasil wawancara dengan dokumentasi; (3) peneliti membandingkan data hasil observasi dengan dokumentasi.

5. Teknik Analisis Data

Sugiyono (2017) mengatakan bahwa metode analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data menurut Miles & Huberman dalam Iskandar dkk (2010) dengan menggunakan empat tahapan, antara lain:

1. Pengumpulan data

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data untuk mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yang digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan pembiayaan pendidikan. Selain itu, peneliti mendapatkan dokumen asli dari data dalam bentuk gambar dan dokumen yang diperlukan. Semua hasil pengumpulan data dikumpulkan untuk mendukung temuan penelitian ini.

2. Reduksi data

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang hasil penelitian, data kasar yang dipilih dan difokuskan tentang pengelolaan pembiayaan pendidikan di Ar-Risalah Krueng Sabee Aceh Jaya. Data yang telah dipilih dan difokuskan disusun menjadi hubungan satu sama lain.

3. Penyajian data

Pendeskripsian sekumpulan data yang disusun yang memungkinkan pengambilan kesimpulan dan tindakan disebut penyajian data. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, menyusun informasi tentang pengelolaan pembiayaan pendidikan di Ar-Risalah Krueng Sabee Aceh Jaya, penyajian dilakukan dengan menyusun data secara sistematis.

4. Kesimpulan

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih tepat, kesimpulan yang relevan segera

diverifikasi dengan melihat dan mempertanyakan kembali catatan lapangan.

Kesimpulan dari analisis data ini didasarkan pada reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data, yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil

1. Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di MAS Ar-Risalah Krueng Sabee Aceh Jaya

a. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan

Madrasah Aliyah Ar-Risalah Krueng Sabee Aceh Jaya adalah madrasah aliyah swasta di bawah naungan Yayasan Ar-Risalah dalam menjalankan seluruh kegiatan pendidikan diperlukan perencanaan guna pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi madrasah. Penerapan perencanaan pembiayaan pendidikan di MAS Ar-Risalah Krueng Sabee Aceh Jaya bertujuan agar proses pengalokasian dana dapat mencapai sasaran yang ingin dicapai secara efektif dan efisien sehingga memberikan manfaat bagi seluruh pelaku dan pengelola pendidikan di MAS Ar-Risalah Krueng Sabee Aceh Jaya.

Madrasah ini adalah lembaga swasta yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Selain itu, orang tua siswa memberikan dana kepada lembaga ini untuk mendukung

kegiatan pembelajaran agar berjalan dengan baik. Hasil dari wawancara dengan narasumber yang telah ditentukan diperoleh informasi bahwa selain dari pemerintah, MAS Ar-Risalah Krueng Sabee Aceh Jaya mendapatkan pembiayaan dari:

1. Biaya Penerimaan Siswa Baru

Sumber pembiayaan di MAS Ar-Risalah Krueng Sabee Aceh Jaya yang utama dari siswa yaitu berupa uang masuk siswa baru. Besaran dana PSB di MAS Ar-Risalah Krueng Sabee Aceh Jaya bersifat temporer atau tidak tetap.

2. Biaya Pembangunan

Biaya pembangunan merupakan sumber dana yang diperoleh dari penerimaan siswa baru. Biaya pembangunan diperuntukan untuk pembangunan gedung atau fasilitas baru. Di samping itu, biaya pembangan juga diperuntukan untuk pemeliharaan gedung dan fasilitas lainnya. Biaya pembangunan bisa berubah jumlahnya setiap tahunnya. Hal ini disesuaikan dengan harga material bangunan dan biaya pemeliharaan gedung dan fasilitas lainnya.

3. Biaya Tahunan

Sumber biaya lainnya adalah biaya tahunan. Biaya tahunan ini dipungut diawal tahun ajaran baru setiap tahun. Sumber dana ini dipungut dari setiap siswa dengan jumlah besaran sama.

4. Sumbangan Pembinaan Pendidikan

Pemasukan terbesar dari orang tua siswa adalah Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang dibayarkan secara rutin setiap bulan dimana dana tersebut digunakan untuk menunjang proses kegiatan pembelajaran di Ar-Risalah Krueng Sabee. Jumlah biaya sumbangan pembinaan pendidikan yang harus dibayar di setiap tingkatan kelas baik tingkat tsanawiyah (kelas 1, 2, dan 3) dan tingkat aliyah (kelas 4, 6, dan 6) adalah sama.

Biaya sumbangan pembinaan pendidikan yang sudah ditetapkan tidak akan berubah sampai siswa selesai sekolah. Ini membuat orang merasa nyaman bahwa biaya pendidikan anak mereka tidak akan naik. Akibatnya, diharapkan tanggung jawab orang tua dan wali siswa akan dikurangi oleh kebijakan ini.

5. Sumbangan sukarela dari masyarakat

Sumbangan ini yang diberikan secara sukarela, tulus, dan tidak mengikat, biasanya dalam bentuk infaq.

Menurut kepala madrasah, Ar-Risalah Krueng Sabee Aceh Jaya telah memulai proses perencanaan pembiayaan pendidikan sejak awal, yang meliputi:

- a. Menentukan tujuan berdasarkan tujuan dan visi sekolah;
- b. Menentukan jumlah dana yang diperlukan untuk pendidikan. Siswa baru adalah satu-satunya yang harus memutuskan jumlah yang harus dibayar untuk sumbangan

pembinaan pendidikan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa institusi tersebut menggunakan iuran komite tetap, yang berarti bahwa iuran akan tetap konsisten dari saat siswa masuk ke kelas satu hingga saat mereka masuk ke kelas enam.

- c. Total penerimaan madrasah dapat dihitung berdasarkan jumlah komite yang disepakati. Langkah selanjutnya adalah membuat dan memilih rencana tindakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam waktu dekat.
- d. Penglokasian anggaran per kegiatan. Pengalokasian ini dilakukan berdasarkan jumlah total dana yang dialokasikan untuk kegiatan pendidikan.

Penyusunan anggaran merupakan suatu proses yang menyangkut besarnya penerimaan dan pengeluaran madrasah. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua yayasan menyebutkan bahwa kepala madrasah selaku manager akan membuat usulan program kegiatan yang akan dilaksanakan. Besarnya alokasi biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program kegiatan tersebut kemudian dimusyawarahkan dengan yayasan, komite, kepala madrasah, wakil kepala madrasah, bendahara dan seluruh guru dan pegawai. Hasil musyawarah tersebut akan dipilih program kegiatan apa yang akan dilaksanakan kedepannya kemudian akan ditentukan besarnya alokasi biaya yang dibutuhkan

dalam melaksanakan program kegiatan yang akan dilaksanakan kedepannya. Hasil musyawarah inilah yang kemudian akan menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah. Rencana ini disusun setiap awal tahun ajaran dan dihitung pada saat siswa masuk dan diterima di madrasah. Anggaran disusun berdasarkan jumlah siswa yang kemudian ditentukan besarnya iuran setiap siswa. Berdasarkan iuran per siswa akan dihitung perkiraan total penerimaan madrasah kemudian ditentukan alokasi anggaran biayanya sesuai dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana yang sudah dimusyawarahkan dan sudah disepakati berdasarkan hasil musyawarah tersebut kemudian mendapat pengesahan dari Yayasan dan komite madrasah kemudian akan dilaksanakan oleh kepala madrasah.

b. Penggunaan Pembiayaan Pendidikan

Semua proses pembiayaan dicatat dalam buku catatan penerimaan sumbangan pembinaan pendidikan harian. Selanjutnya, buku catatan ini dipindahkan ke dalam buku pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan per kelasnya. Buku Kas Umum madrasah digunakan untuk mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran. Bendahara juga melakukan rekap penerimaan setiap bulannya untuk mengetahui berapa dana yang sudah masuk/diterima dan untuk mengetahui persentase jumlah siswa yang sudah dan yang belum membayar sumbangan pembinaan

pendidikan . Demi keamanan dana yang sudah diterima, kemudian dana tersebut disimpan di bank dengan rekening atas nama sekolah dan yang bertanggung jawab sebagai penyalangan iuran sumbangan pembinaan pendidikan tersebut adalah bendahara. Rekening sekolah tersebut juga sudah dipisahkan dengan rekening yang digunakan untuk menerima dana bantuan operasional sekolah (wawancara dengan bendahara madrasah)

Iuran sumbangan pembinaan pendidikan secara umum digunakan untuk membayar gaji guru. Selain itu, juga digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran lain yang harus dikeluarkan sebelum dana bantuan operasional sekolah diperoleh. Hal ini sering terjadi dikarenakan dana bantuan operasional sekolah sering mengalami keterlambatan dalam pencairannya. Pembayaran iuran sumbangan pembinaan pendidikan juga terkadang sering tersendat dikarenakan masih banyak siswa yang menunggak pembayaran. Siswa baru akan menyelesaikan tunggakan tersebut pada saat mendekati akhir semester yaitu pada saat siswa sudah akan melaksanakan ujian semester (wawancara dengan kepala madrasah).

Pengeluaran madrasah digunakan untuk membiayai komponen – komponen pembiayaan antara lain :

1. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya pendidikan penyediaan

sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia.

2. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi: gaji pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak bisa digaji menggunakan dana bantuan operasional sekolah), bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, pemeliharaan sarana dan prasarana dan sebagainya.

Proses pengeluaran dana di Madrasah Aliyah Ar-Risalah Krueng Sabee dilakukan secara langsung berdasarkan instruksi kepala sekolah. Kepala sekolah langsung menginstruksikan kepada bendahara jika akan melakukan pembayaran atau pengeluaran. Bendahara kemudian langsung melakukan pembayaran.

Seringkali, rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah mengabaikan pelaksanaan dana. Salah satu penyebab ketidaksesuaian ini adalah fakta bahwa banyak siswa masih belum membayar iuran sumbangan pembinaan pendidikan. Akibatnya, jumlah dana yang diterima selama periode tersebut hanya digunakan untuk membayar guru, tunjangan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tunjangan guru kelas, dan pembelian bahan habis pakai dan alat tulis kantor. Jumlah yang dibayarkan juga tidak sesuai dengan rencana karena banyaknya siswa yang belum membayar.

Sumbangan sukarela dari para donatur tidak selalu dalam bentuk tunai; mereka bisa

dalam bentuk barang, seperti perlengkapan olahraga atau bahan bangunan. Setiap sumbangan yang diterima akan secara langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan aktual madrasah, seperti perbaikan sarana prasarana, pembelian perangkat pembelajaran, dan lainnya. Setiap kontribusi, baik dalam bentuk barang atau uang, harus dicatat untuk mengetahui jumlah kontribusi selama periode tertentu.

c. Pengawasan dalam Penggunaan Pembiayaan Pendidikan

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa dana digunakan atau digunakan sesuai dengan anggaran sekolah. Dana yang diterima dan dikeluarkan diawasi setiap enam bulan sekali oleh yayasan, komite. Selain memeriksa Buku Kas Umum, juga memeriksa semua bukti, termasuk bon, kwitansi, dan faktur.

Yayasan dan komite jarang memeriksa pembukuan madrasah. Ketika ada masalah atau kendala, yayasan biasanya akan melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Dalam kebanyakan kasus, pengawasan hanya berfokus pada kondisi fisik sekolah dan perkembangan. Selama semua proses yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik, proses pengelolaan juga dianggap berjalan dengan baik.

Pengawasan yang dilakukan oleh komite juga hampir tidak pernah dilaksanakan. Hal ini dikarenakan ketua

komite berasal dari lingkungan internal madrasah yaitu guru yang kebetulan juga menjadi wali murid sehingga belum benar-benar mewakili masyarakat dan cenderung kurang objektif dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan.

d. Pelaporan Pembiayaan Pendidikan dan Pertanggungjawaban

Setelah pengawasan dan pemeriksaan selesai, langkah berikutnya adalah pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan madrasah atas penggunaan dana tersebut. Bendahara membuat laporan ini, yang dilaporkan setiap enam bulan sekali. Laporan ini untuk mengetahui kondisi dan posisi keuangan madrasah yang sebenarnya. Selain itu, bisa mengoreksi dan memeriksa apakah semua rencana pembiayaan yang termasuk dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja madrasah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

Setelah tugas pengeluaran selesai dan dilaporkan, yayasan dan komite akan memeriksa laporan tersebut untuk memastikan bahwa dana telah digunakan sesuai dengan perencanaan. Pada periode berikutnya, laporan ini akan digunakan sebagai referensi untuk perencanaan keuangan.

2. Pembahasan

Di MAS Ar-Risalah Krueng Sabee Aceh Jaya, ada sistem manajemen pembiayaan yang sangat baik. Dalam struktur

manajemen di mana pengelolaan tidak berada di pusat, yayasan hanya berfungsi sebagai pengawas yang memantau bagaimana pengelolaan pembiayaan dilakukan. Kepala sekolah, dibantu oleh bendahara dan wakil sekolah, bersama dengan dewan guru, bertanggung jawab untuk menjalankan manajemen pembiayaan.

Secara keseluruhan, manajemen pembiayaan di MAS Ar-Risalah Krueng Sabee Aceh Jaya berjalan dengan baik. Namun, ada beberapa masalah dengan manajemen pembiayaan, yaitu: (1) Struktur manajemen memungkinkan orang dalam penyelenggara madrasah (yayasan) untuk memegang jabatan dan fungsi manajemen pembiayaan, yang menghasilkan pengawasan dan pemeriksaan yang tidak objektif; (2) Pembukuan, di mana semua uang yang diterima oleh madrasah dimasukkan ke dalam pembukuan. Pencatatan dilakukan menggunakan buku kas umum. Bendahara seharusnya langsung memindahkan semua transaksi yang sudah dicatat dalam buku penerimaan ke dalam buku kas khusus misalnya buku kas iuran sumbangan pembinaan pendidikan dan buku kas tabungan dsb.

Beberapa masalah yang terkadang muncul dikarenakan pencatatan yang tidak rapi dan teliti. Terkadang terjadi selisih antara catatan bendahara dengan pembayaran iuran sumbangan pembinaan pendidikan. Orang tua

siswa merasa sudah membayar akan tetapi dalam catatan bendahara belum tercatat. Sehingga bendahara akan sangat sulit melacak transaksi tersebut. Untuk itu sebaiknya bendahara mampu melaksanakan pembukuan yang baik sesuai dengan prinsip pembukuan dalam akuntansi. Masalah lainnya adalah dikarenakan semua transaksi pembayaran iuran sumbangan pembinaan pendidikan tidak langsung di pindahkan ke dalam buku besar umum penerimaan, bendahara cenderung sering terlambat dalam membuat rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran setiap bulannya.

Pengawasan terhadap pengeluaran akan sulit dilakukan yang dilakukan terutama pengeluaran untuk tiap komponennya. Yayasan dan komite yang bertindak sebagai pengawas terhadap penggunaan keuangan oleh kepala madrasah, Bendahara hanya melakukan pengawasan secara observasi fisik, yaitu selama proses pembelajaran terlaksana dengan baik, gaji guru dan pegawai terpenuhi, sarana dan prasarana terpenuhi, serta prestasi anak meningkat dianggap bahwa semua sudah berjalan dengan yang direncanakan. Dengan cara ini, pihak madrasah dan pengelola kurang bisa mengevaluasi kekurangan dan kelebihan terhadap proses yang sedang berjalan. Di samping itu pihak madrasah dan pengelola kurang bisa mengetahui seberapa besar manfaat yang diperoleh. Padahal seharusnya

hal ini bisa dijadikan acuan untuk menentukan perencanaan pada periode mendatang.

Ada baiknya madrasah swasta tidak bergantung hanya pada pemerintah untuk membayarnya. Mereka harus menghubungi orang tua dan masyarakat melalui komite madrasah untuk mendapatkan uang untuk memperlancar proses pembelajaran. Kepala madrasah harus mampu memanfaatkan peluang-peluang yang ada dan dapat memaksimalkan penggunaannya guna tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan. Kepala madrasah dapat meningkatkan kompetensi manajerial agar dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan dapat dijalankan dengan baik dan lebih profesional.

Sekolah seharusnya mempertimbangkan kebutuhan siswa saat menentukan jumlah sumbangan pembinaan pendidikan. Untuk menentukan besarnya iuran sumbangan pembinaan pendidikan berdasarkan kebutuhan siswa, faktor-faktor berikut dipertimbangkan: (1) faktor kebutuhan belajar, yang menunjukkan apa yang dibutuhkan siswa selama pendidikan; (2) faktor standar nasional pendidikan, yang merupakan standar atau standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan kebutuhan siswa di sekolah, (3) Faktor Visi, Misi, dan Tujuan Madrasah, yang menjelaskan tujuan yang ingin dicapai

madrasah dalam melaksanakan pembelajaran; (4) Masyarakat/Komite Madrasah, yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan belajar siswa; dan (5) Faktor Program Kegiatan Pembelajaran, yang menjelaskan kegiatan apa yang akan dilakukan selama pembelajaran; dan (6) Faktor Alokasi Anggaran Dana, yang menjelaskan secara rinci tentang apa yang akan dilakukan selama pembelajaran. Sehingga dana didistribusikan dengan lebih efektif, guru harus menentukan program atau kegiatan yang menjadi bagian penting dari proses pembelajaran, (7) Faktor peseta siswa adalah faktor yang menentukan berapa banyak siswa yang mengikuti pendidikan di institusi pendidikan, dan (8) faktor sumbangan pembinaan pendidikan adalah faktor dari proses yang mencakup faktor sebelumnya yang diharapkan dapat menghasilkan iuran sumbangan pembinaan pendidikan yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan siswa.

Penggunaan anggaran pendapatan dan belanja madrasah harus sesuai dengan skala prioritas yang sudah ditetapkan, dan anggaran harus disesuaikan dengan anggaran tersebut. Untuk memastikan bahwa dana yang ada digunakan dengan tepat, manajemen madrasah harus diawasi secara rutin dan menyeluruh. Laporan pertanggungjawaban pembiayaan madrasah menjelaskan uang yang diterima dan dikeluarkan.

Semua langkah yang diambil untuk mengelola pembiayaan pendidikan seharusnya menghasilkan hasil yang menguntungkan dalam jangka pendek dan jangka panjang, termasuk peningkatan hasil belajar siswa yang memenuhi kebutuhan pendidikan mereka dan memberikan akses ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kecakapan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan kemajuan secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Perencanaan pembiayaan Madrasah Aliyah Ar-Risalah Krueng Sabee Aceh Jaya untuk dana pemerintah dan sumbangan pembinaan pendidikan telah disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan siswa.

Setiap enam bulan sekali, yayasan, komite, dan guru melakukan pengawasan terhadap penggunaan pembiayaan pendidikan yang berasal dari sumbangan pembinaan pendidikan.

Laporan dan pertanggungjawaban pembiayaan dibuat dan dikirim ke yayasan dan semua pihak yang berwenang. Ini dilakukan dengan membuat laporan yang menguraikan semua uang yang diterima dan dikeluarkan selama enam bulan terakhir, dengan melampirkan semua bukti seperti bon, kwitansi, dan ransaksi yang menunjukkan bahwa uang telah dibayar.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG). 2013. *Program Kemitraan untuk Pengembangan Kapasitas dan Analisis Pendidikan (ACDP): Studi Pendanaan Pendidikan Madrasah di Indonesia*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Barnawi & Arifin, 2013. *Mengelola Sekolah Berbasis Entrepreneurship*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI 2015: Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Madrasah dan PPS
- Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership. 2013. *Studi Pendanaan Pendidikan Madrasah di Indonesia*. Jakarta: BALITBANG, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Idhochi Anwar, M. 2013. *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Iskandar, Rusman, Maschandra, dan Ridvia Lisa. 2010. Analisis Data Kualitatif Model Milles dan Huberman: Sebuah rangkuman dari Buku Analisis Data Kualitatif, Mathew B, Milles dan A, Michael Huberman Terjemahan Tjetjep Rihindi Rohidi, UI-Press 1992.
- Matin. 2014. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muhajirin. 2012. Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Bersumber Dari Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Manajemen Pendidikan* Volume 1 No 2.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang *Standar Nasional Pendidikan*. 2005. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 Tentang *Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar*. 2012. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang *Pendanaan Pendidikan*. 2008. Jakarta
- Poerwadarminta W.,J.,S. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Sariakin. 2023. *Kepemimpinan Dalam Dunia Pendidikan: Tinjauan Perspektif Manajemen Pendidikan*. Surabaya: Pustaka Aksara.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. 2003. Jakarta.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. 2004. Jakarta.